

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah metode dalam sistem negara demokrasi yang memastikan warga negara memilih calon pemimpinnya pada tingkat demokrasi lokal (Akbar 2016). Melalui Pilkada, warga negara diberikan hak untuk memilih pemimpin daerah yang dianggap mampu mewujudkan aspirasi dan kebutuhan publik (Tjenreng 2020). Pilkada tidak sekedar mengejar target keserentakan pencalonan, dinamika kampanye, dan pelantikannya saja akan tetapi kesejalanannya program agenda daerah dan pembentukan sikap politik pada tingkat lokal (Arifulloh 2015).

Pilkada secara langsung telah menjadi mekanisme untuk memperkuat partisipasi politik sekaligus memperlihatkan kualitas demokrasi lokal. Pemilihan kepala daerah secara serentak merupakan salah satu cara untuk mewujudkan akuntabilitas lokal, kesetaraan politik, dan responsivitas pemerintah daerah (Arifulloh 2015). Lebih dari itu, hasil dari pilkada seharusnya mampu membawa masyarakat menuju perbaikan pada afektif, kognitif dan evaluatif sebagai bentuk menciptakan orientasi masyarakat dalam menilai pada aspek sosial, politik, dan ekonomi daerahnya (Sucipto 2014).

Penyelenggaraan pilkada yang berkualitas dan profesional akan berkontribusi secara nyata terhadap transformasi politik ke arah yang lebih baik. Namun demikian dalam praktiknya, dinamika Pilkada kerap melahirkan berbagai isu, mulai dari politik uang, kampanye hitam, rendahnya kesadaran partisipasi politik hingga kurangnya kepatuhan peserta pilkada dan partai politik pada peraturan yang berlaku (Begovic 2021). Oleh karena itu, Pilkada 2024 menjadi momen strategis untuk merefleksikan kembali bagaimana lembaga penyelenggara pemilu dapat meningkatkan kualitas partisipasi pemilih.

Dalam konteks tersebut, strategi menjadi elemen penting yang harus dimiliki oleh setiap aktor yang terlibat dalam penyelenggara pemilu, termasuk

Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu. Strategi adalah rangkaian konsep yang ditempuh oleh individu maupun organisasi untuk meraih tujuan tertentu, dengan cara menetapkan arah dan sasaran jangka panjang, menjalankan berbagai tindakan terencana, serta mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan guna mencapai target tersebut (Pulungan, Rahmatunnisa, and Herdiansah 2020). Pada konteks ini, strategi KPU Kota Bandung harus berfokus untuk menciptakan kondisi yang mendukung terbentuknya pemilih yang rasional. Pemilih rasional adalah individu yang mampu menggunakan hak pilihnya berdasarkan pertimbangan logis, informasi yang memadai, dan kesadaran akan dampak pilihan politiknya terhadap masa depan daerah .

Komisi Pemilihan Umum sebagai institusi penyelenggara memiliki tugas dan tanggung jawab dalam memastikan keberlangsungan pemilu berjalan dengan secara jujur, adil, dan demokratis. Lebih dari itu, KPU juga berperan dalam melakukan sosialisasi guna memantapkan pendidikan politik pada masyarakat agar masyarakat dapat menelan informasi dan lapangan secara rasional. Pendidikan politik merupakan agenda formal dengan tujuan menyampaikan informasi kepemiluan dan membangun kesadaran kritis agar tidak terjebak pada politik transaksional dan sikap apolitis. Formulasi strategi KPU merancang tujuan pelaksanaan sosialisasi, sasaran pelaksanaan sosialisasi, relevansi materi sosialisasi, serta metode yang digunakan sosialisasi. KPU menggunakan metode tatap muka dan menggunakan media sosial dalam memakismalkan strategi. Selain itu, KPU melakukan segmentasi dalam pelaksanaan sosialisasi, misalnya segmentasi pemilih pemula, pemilih perempuan, pemilih pemuda dalam membentuk sikap pemilih rasional, kritis dan bertanggungjawab secara politik (Gleko, Suprojo, and Lestari 2017).

Pemilih merupakan instrumen utama dalam negara demokrasi, sebagai pemilih seyogyanya perlu peningkatan kualitas pemilih agar dapat mengejawantahkan kualitas demokrasi yang baik. Pendidikan adalah sebuah proses peningkatan kualitas sikap dan kognitif baik secara formal dan informal dengan bertujuan guna mendidik, transfer ilmu pengetahuan serta informasi

yang disampaikan (Sompa et al. 2023). Dalam mewujudkan pemilih rasional hendaknya pemilih diberi bekal pendidikan politik oleh institusi. Dalam pengambilan keputusan, pemilih rasional tidak mudah terpengaruh sentimen emosional, janji populis manis, atau tekanan kelompok, namun menilai secara objektif berdasarkan *track record*, elektabilitas, dan kapasitas kepemimpinan (Sudibyo 2023). Ciri utama dari pemilih rasional adalah kemampuannya dalam menganalisis informasi politik secara kritis dan mengambil keputusan secara mandiri demi kepentingan jangka panjang. Oleh karena itu, keberadaan pemilih rasional sangat penting dalam mewujudkan pemilu yang berkualitas dan demokrasi yang substansial.

Pemilih rasional merupakan sikap perilaku pemilih yang membuat keputusan memilih berdasarkan perhitungan untung dan rugi demi kepentingannya. Pemilih rasional memaksimalkan *platform* dan informasi tentang kandidat atau partai politik yang melakukan kampanye. Penilaian tersebut menitikberatkan kepada informasi *track record* kandidat atau partai politik dan program kerja yang bersifat menyelesaikan masalah (*policy-problem solving*). Menurut Downs (1957), pemilih bertindak seperti konsumen dalam pasar politik. Dengan kesadaran tersebut, pemilih akan memilih kandidat atau partai politik yang dianggap paling mampu memberikan manfaat (*utility*) tertinggi bagi dirinya. Dalam konteks ini, pemilih bukan sekadar memilih karena loyalitas, keterikatan identitas, atau emosi melainkan melalui pertimbangan yang logis dan hitungan kalkulatif terhadap program kerja dan kemungkinan hasil dari pilihannya.

Menurut Downs (1957), pada umumnya pemilih tidak memiliki pengetahuan yang memadai mengenai politik. Hal ini disebabkan karena manfaat yang diperoleh dari informasi politik sering kali tidak sebanding dengan upaya atau pengorbanan yang harus dikeluarkan untuk mendapatkannya. Oleh karena itu, bagi pemilih, mencari informasi politik secara mendalam dianggap sebagai tindakan yang tidak rasional.

Pemilih rasional melahirkan orientasi politik kedepan terhadap permasalahan nasional yang dihadapi. Pemilih rasional tidak tertarik kepada program jangka pendek, pemilih rasional juga menganalisis program yang ditawarkan. Pemilih jenis ini tidak terlalu mementingkan ikatan ideologi kepada suatu kandidat atau partai politik. Seperti paham, ikatan primordial, nilai tradisional. Analisis logis yang menjadi dominan pada jenis pemilih ini.

Praktik Pilkada 2024 menimbulkan berbagai masalah seperti maraknya politik uang, menguatnya fenomena dinasti politik, polarisasi serta rendahnya partisipasi dan netralitas aparatur negara. Selain itu, permasalahan kelembagaan penyelenggara pemilu dan lemahnya pendidikan politik menjadi sorotan utama yang dinilai menghambat terwujudnya demokrasi substantif (Fisipol 2025). Fenomena berupa polarisasi pun tidak hilang, hal tersebut terjadi terutama berbasis etnis, agama, dan identitas lokal yang didorong oleh strategi kampanye politik identitas yang kerap mengesampingkan kapasitas dan visi calon pemimpin serta memicu potensi konflik horizontal (Aroen 2024). Evaluasi ini menekankan pentingnya pergeseran ke politik programatik, reformasi sistem partai, serta penguatan peran masyarakat sipil melalui pendidikan politik yang mendorong keterlibatan aktif warga negara.

Pilkada tidak hanya dimaknai sebagai proses memilih pemimpin daerah semata, tetapi juga merupakan momentum penting dalam membentuk dan menguji kualitas pemilih dalam sistem demokrasi lokal. Lebih dari sekadar memilih calon kepala daerah, Pilkada seharusnya menjadi sarana untuk mendorong lahirnya pemilih yang rasional, yaitu pemilih yang mampu menggunakan hak pilihnya berdasarkan pertimbangan logis, memanfaatkan *platform* informasi, dan kesadaran politik yang matang. Dengan demikian, keberhasilan Pilkada tidak hanya diukur dari tingkat partisipasi, tetapi juga dari sejauh mana pemilih mampu menentukan pilihan secara selektif dan rasional.

Dalam konteks ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung memegang peran sentral sebagai penyelenggara yang tidak hanya bertugas sebagai penyelenggara saja, tetapi juga memiliki tanggung jawab edukatif.

Salah satu tugas penting KPU adalah menyediakan pendidikan politik yang berkelanjutan kepada masyarakat agar tercipta budaya politik pemilih yang rasional di Kota Bandung. Melalui program-program sosialisasi, pendidikan pemilih, dan pelibatan kelompok masyarakat, KPU diharapkan mampu mendorong tumbuhnya kesadaran politik yang kritis dan partisipatif, sehingga kualitas demokrasi lokal dapat ditingkatkan secara substansial.

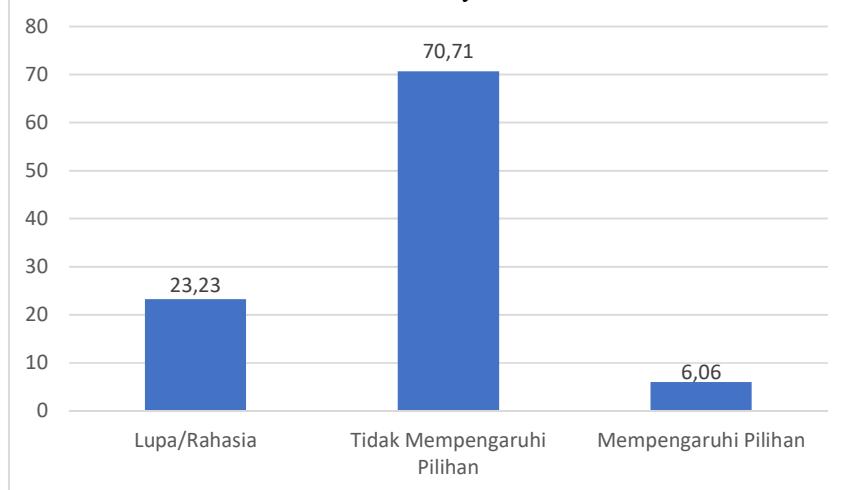
Penelitian mengenai peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berfokus pada partisipasi pemilih merupakan penelitian yang tidak asing dan telah banyak dilakukan sebelumnya, baik skala nasional maupun lokal. Sebagian besar penelitian tersebut berfokus kepada tingkat partisipasi, efektivitas sosialisasi, atau hambatan teknis saat pelaksanaan pemilu. Seperti evaluasi distribusi logistik KPU, strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan masih banyak lagi (Ardipandanto 2019). Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik meneliti bagaimana strategi yang dirancang dan diimplementasikan oleh KPU secara terarah untuk membentuk karakter pemilih yang rasional.

Berangkat dari celah tersebut, penelitian ini hadir untuk melengkapi kajian-kajian seputar KPU yang secara spesifik membahas strategi KPU dalam membentuk pemilih rasional yang memiliki kemampuan berpikir kritis dan logis dalam pengambilan keputusannya (Driliandra 2023). Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan fokus pada strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung dalam membentuk pemilih yang rasional pada Pilkada 2024. Fokus ini merupakan pembaruan (*novelty*) karena memperluas perspektif dari sekadar mengejar angka partisipasi menjadi upaya peningkatan kualitas pemilih melalui pendekatan strategi kelembagaan yang bersifat edukatif dan partisipatif. Dengan menekankan pentingnya pendidikan politik dan komunikasi strategis oleh KPU dalam menghadapi tantangan seperti politik uang, apatisme, dan polarisasi identitas, penelitian ini memberikan sumbangan teoritis dan praktis yang berbeda dari riset-riset sebelumnya. Dengan pendekatan kualitatif dan studi kasus di Kota Bandung, penelitian ini

memberikan kontribusi baru dalam diskursus akademik mengenai pilkada dengan penekanan pada pentingnya strategi organisasi berbasis pendidikan pemilih yang berkelanjutan. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk memahami ubagaimana perencanaan, pelaksanaan, serta tantangan yang dihadapi KPU dalam mengedukasi masyarakat agar mampu menggunakan hak pilihnya secara cerdas, kritis, dan berdasarkan informasi yang relevan.

Pemilih rasional merupakan instrumen dari sebuah negara demokrasi yang mapan. Anomali pada kontestasi politik elektoral kerap terjadi terutama pada praktik politik uang dan pengaruh janji-janji populis dan pragmatis yang tak pernah lepas di setiap kontestasi politik (Bouk 2022). Fenomena politik uang, masyarakat belum bisa menolak praktik politik uang meskipun penerimaan politik uang tak selalu menjadi penentu pemilih menggunakan hak pilihnya untuk memilih kandidat yang memberi politik uang.

Gambar 1. 1 Data Survey Pemilih Rasional



*Sumber: Laporan Akhir Survey Nasional 2014 (diolah oleh penulis)*

Pada tabel 1, penemuan membuktikan bahwa pada pemilu 2014 masyarakat menyikapi secara resisten dengan adanya politik uang. Hasil survey menyatakan, bahwa 70,71% mengaku bersikap netral dan tidak terpengaruh oleh praktik politik uang. Sementara itu, hanya sekitar 6,06% yang menyatakan bahwa politik uang memengaruhi pilihan politik mereka. Sisanya merupakan kelompok pemilih yang belum jelas sikapnya masih bimbang antara menerima atau menolak politik

transaksional. Tingginya angka pemilih rasional ini juga berkorelasi dengan tingkat partisipasi pemilu 2014 yang mencapai 75,11%, dibandingkan 24,89% pemilih yang memilih untuk golput. Penemuan tersebut membuktikan, rasionalitas pemilih di Indonesia belum sepenuhnya stabil, melainkan bersifat dinamis dan kontekstual. Hal ini menunjukkan bahwa karakter pemilih Indonesia masih berada dalam fase transisi menuju rasionalitas yang lebih matang, di mana nilai-nilai pragmatis dan kesadaran politik rasional masih saling bertarung dalam memengaruhi perilaku elektoral (Bouk 2022).

Kualitas pemilih mesti ditingkatkan lagi untuk menghadapi kontestasi politik hingga sistem politik, maka, seyogyanya kandidat dipilih berdasarkan kemampuan kandidat dalam menjawab dengan baik dan solutif terkait isu sosial terkini hingga yang akan datang. Semakin efektif kandidat dalam menawarkan solusi yang tepat untuk menjawab permasalahan, maka semakin tinggi kemungkinan kandidat untuk dipilih oleh masyarakat (Firmanzah 2008). Oleh karena itu penelitian ini penting karena berupaya melihat bagaimana strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dapat mendorong pembentukan pemilih yang tidak hanya partisipatif, namun memiliki perilaku pemilih rasional, kritis dalam menentukan pilihannya. Penelitian ini berkontribusi dalam menjawab tantangan tersebut menelusuri strategi KPU Kota Bandung pada Pilkada 2024 khususnya dalam upaya membentuk pemilih yang mampu memilah informasi, menilai calon secara objektif, dan tidak mudah terjebak dalam politik transaksional.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini tercakup pada pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung dalam mewujudkan pemilih yang rasional pada Pilkada 2024?
2. Apa saja faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan strategi KPU Kota Bandung dalam mewujudkan pemilih yang rasional pada Pilkada 2024?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis strategi sosialisasi politik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung dalam mewujudkan pemilih yang rasional pada Pilkada 2024. Secara spesifik, penelitian ini diarahkan untuk menggambarkan bentuk-bentuk strategi yang diterapkan oleh KPU, termasuk pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk strategi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung dalam mewujudkan pemilih yang rasional pada Pilkada 2024.
2. Untuk mengetahui serta menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan strategi KPU Kota Bandung dalam mewujudkan pemilih yang rasional pada Pilkada 2024.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari hasil penelitian ini bersifat teoritis dan praktis yaitu:

### **1) Manfaat Teoritis**

Yaitu mengembangkan studi ilmu politik pada aspek pemilu, partisipasi politik, dan budaya politik.

## 2) Manfaat Praktis

- a. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi berbagai pihak yang terkait, untuk mengetahui efektifitas strategi dan agenda KPU untuk mewujudkan pemilih yang rasional.



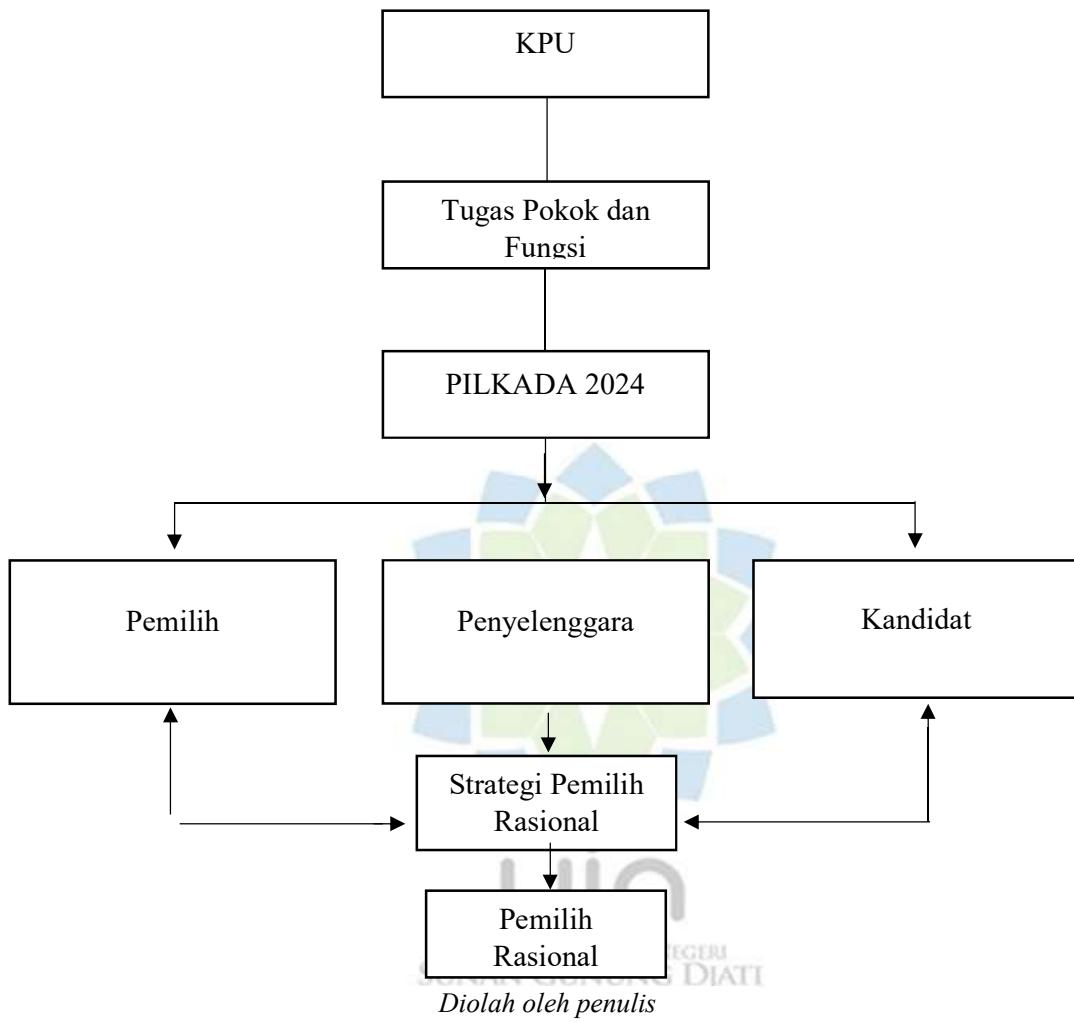
## **E. Kerangka Berpikir**

Pilkada merupakan demokrasi elektoral tingkat lokal seperti pemilihan Gubernur, Wali Kota dan Bupati. Pelaksanakan pilkada menjadi tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah untuk mensukseskan agenda politik hingga tuntas dengan berbagai tugas pokok dan fungsi serta wewenang nya sebagai institusi negara. Tugas fungsi KPU secara sederhana diantaranya; merencanakan program dan melaksanakan pilkada atau dan menyosialisasikan penyelenggaraan pilkada. Sosialisasi politik merupakan tugas KPU kepada masyarakat dengan tujuan mengajak keikutsertaan dalam pilkada guna meningkatkan partisipasi masyarakat. Pilkada merupakan kontestasi politik yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat semata, akan tetapi partisipasi masyarakat harus diimbangi dengan perilaku pemilih rasional. Dalam menjalankan sosialisasi KPU, KPU tidak hanya melakukan terciptanya partisipasi pemilih namun juga mewujudkan pemilih rasional.

Untuk mewujudkan pemilih rasional, dibutuhkan strategi oleh KPU dalam menjalankan sosialisasi politik untuk mewujudkan pemilih rasional yang menggunakan nalar logis, pemilih yang memanfaatkan platform informasi untuk menilai program kerja kandidat atau partai guna menggunakan hak pilihnya dengan cerdas dan rasional. Dalam penelitian ini mengangkat masalah bahwa belum adanya informasi tentang urgensi memilih dengan rasional dan belum ada data bahwa pemilih rasional di Kota Bandung. Penelitian ini berjudul “Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Dalam Mewujudkan Pemilih Yang Rasional Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024” dengan berusaha mengkaji bagaimana implementasi dan strategi yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum kota Bandung dalam melakukan sosialisasi pendidikan politik guna mewujudkan pemilih rasional di kota Bandung.

Penulis akan menggambarkan dan menjelaskan alur penelitian melalui kerangka berpikir seperti berikut:

Gambar 1. 2 Kerangka Berpikir Penelitian



Pilkada 2024 merupakan konteks utama pada penelitian ini, keterlibatan proses pilkada setidaknya memiliki 3 unsur yakni, penyelenggara, pemilih atau masyarakat, dan kandidat. Keterlibatan KPU sebagai penyelenggara pemilu merupakan penting untuk diamati. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, KPU memiliki tanggung jawab untuk memastikan kualitas demokrasi melalui pelaksanaan pemilu yang jujur, adil, dan partisipatif. Salah satu aspek penting dari tugas dan fungsi KPU adalah melakukan sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat serta merancang dan menjalankan program-program pemilu.

Sosialisasi dan pendidikan politik yang dilakukan oleh KPU menjadi instrumen utama untuk membentuk pemahaman pemilih mengenai hak dan tanggung jawabnya dalam pemilihan. Pemilih merupakan instrumen penting dalam demokrasi maka pemilih itu mesti di desain supaya dapat mewujudkan pemilih rasional, maka dari itu pendidikan politik ini diarahkan kepada para pemilih agar memiliki kesadaran kritis, rasionalitas dalam menggunakan hak pilihnya, serta mampu menolak praktik seperti politik uang atau politik tradisional seperti politik identitas yang bersifat manipulatif.

Strategi ini menasaskan pada bagaimana pemilih dapat dijangkau dan didorong untuk menggunakan hak pilihnya secara cerdas dan bertanggung jawab. Sebab, untuk menciptakan demokrasi yang ideal pemilih tidak hanya sebatas partisipatif tetapi rasional dalam menentukan pilihannya.

Keterkaitan antara sosialisasi/pendidikan politik dengan strategi program pemilu tersebut mengarah pada satu tujuan utama, yakni membentuk pemilih yang rasional. Pemilih rasional adalah individu yang mempertimbangkan informasi, visi-misi calon, serta kepentingan jangka panjang dalam menentukan pilihan politiknya. Dengan demikian, proses ini menunjukkan bahwa KPU berperan signifikan dalam membentuk kualitas pemilih melalui pendekatan yang strategis dan edukatif. output dari keseluruhan proses ini adalah pemilih rasional, yaitu warga negara yang menentukan pilihannya secara sadar, logis, dan berbasis informasi yang valid sehingga meningkatkan kualitas demokrasi.